



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 273);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

Kelas jabatan disusun sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Tabel hasil Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. Tabel hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Persediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, merupakan jumlah persediaan pegawai berdasarkan data kepegawaian pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (4) Persediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketersediaan jabatan.

Pasal 4

Sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017.

Pasal 6

- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 7

- (1) Ajudan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan yang berstatus PNS di luar lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia hanya berhak menerima salah satu tunjangan kinerja yang dipilihnya.
- (2) Dalam hal Ajudan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih untuk mendapatkan

tunjangan kinerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penetapan kelas jabatan disesuaikan dengan kepangkatan dan kelas jabatan pada instansi asalnya atau pada kesatuannya.

- (3) Tunjangan Kinerja bagi Ajudan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, kecuali:

- a. ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- c. ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Ajudan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1824

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG KELAS JABATAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	Menteri PPN/ Kepala Bappenas	1
2	17	11
3	16	7
4	15	49
5	14	13
6	13	119
7	12	48
8	11	45
9	10	80
10	9	79
11	8	14
12	7	72
13	6	17
14	5	89
15	4	42
16	3	60

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
17	2	0
18	1	0
	TOTAL	746

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG KELAS JABATAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN,
DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Menteri PPN/Kepala Bappenas	Tanpa Kelas	1	
2	Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	17	1	
3	Deputi Bidang Ekonomi	17	1	
4	Deputi Bidang Pengembangan Regional	17	1	
5	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	17	1	
6	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	17	1	
7	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	17	1	
8	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	17	1	
9	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	17	1	
10	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	17	1	
11	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	17	1	
12	Inspektur Utama	17	1	
13	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	16	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
14	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	16	1	
15	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	16	1	
16	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	16	1	
17	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	16	0	
18	Staf Khusus Menteri	16	3	
19	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan	15	1	
20	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15	1	
21	Kepala Biro Hukum	15	1	
22	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	15	1	
23	Kepala Biro Umum	15	1	
24	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	15	1	
25	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter	15	1	
26	Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara	15	1	
27	Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	15	1	
28	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15	1	
29	Direktur Tata Ruang dan Pertanahan	15	1	
30	Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan	15	1	
31	Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	15	1	
32	Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	15	1	
33	Direktur Otonomi Daerah	15	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
34	Direktur Pangan dan Pertanian	15	1	
35	Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	15	1	
36	Direktur Kelautan dan Perikanan	15	1	
37	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	15	1	
38	Direktur Lingkungan Hidup	15	1	
39	Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	15	1	
40	Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	15	1	
41	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	15	1	
42	Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	15	1	
43	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	15	1	
44	Direktur Pendidikan dan Agama	15	1	
45	Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	15	1	
46	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	15	1	
47	Direktur Pengairan dan Irigasi	15	1	
48	Direktur Transportasi	15	1	
49	Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	15	1	
50	Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	15	1	
51	Direktur Politik dan Komunikasi	15	1	
52	Direktur Aparatur Negara	15	1	
53	Direktur Hukum dan Regulasi	15	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
54	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	15	1	
55	Direktur Pertahanan dan Keamanan	15	1	
56	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	15	1	
57	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangun	15	1	
58	Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral	15	1	
59	Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral	15	1	
60	Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	15	1	
61	Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	15	1	
62	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	15	1	
63	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	15	0	
64	Inspektur Bidang Administrasi Umum	15	1	
65	Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan	15	1	
66	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	15	1	
67	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	15	1	
68	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	15	1	
69	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	13	1	
70	Kepala Bagian Persidangan dan Protokol	13	1	
71	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	13	1	
72	Kepala Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	13	1	
73	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
74	Kepala Bagian Kinerja Pegawai	13	1	
75	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	13	0	
76	Kepala Bagian Bantuan Hukum	13	1	
77	Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum	13	0	
78	Kepala Bagian Program dan Anggaran	13	1	
79	Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama	13	1	
80	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	13	1	
81	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13	1	
82	Kepala Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan	13	1	
83	Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal	13	1	
84	Kepala Bagian Keuangan	13	1	
85	Kepala Bagian Verifikasi Anggaran	13	1	
86	Kepala Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro	13	0	
87	Kepala Subdirektorat Neraca Pembayaran	13	0	
88	Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik	13	1	
89	Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara	13	1	
90	Kepala Subdirektorat Belanja Pemerintah Pusat	13	1	
91	Kepala Subdirektorat Perimbangan Keuangan	13	1	
92	Kepala Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter	13	1	
93	Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional	13	0	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
94	Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah	13	0	
95	Kepala Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara	13	0	
96	Kepala Subdirektorat Perdagangan	13	0	
97	Kepala Subdirektorat Investasi	13	1	
98	Kepala Subdirektorat Kerjasama Ekonomi Internasional	13	1	
99	Kepala Subdirektorat Industri	13	0	
100	Kepala Subdirektorat Pariwisata	13	1	
101	Kepala Subdirektorat Ekonomi Kreatif	13	0	
102	Kepala Subdirektorat Tata Ruang	13	1	
103	Kepala Subdirektorat Pertanahan	13	1	
104	Kepala Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan	13	1	
105	Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan	13	1	
106	Kepala Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional	13	0	
107	Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis	13	0	
108	Kepala Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana	13	0	
109	Kepala Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan	13	1	
110	Kepala Subdirektorat Perdesaan	13	1	
111	Kepala Subdirektorat Perkotaan	13	1	
112	Kepala Subdirektorat Perumahan	13	1	
113	Kepala Subdirektorat Air Minum	13	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
114	Kepala Subdirektorat Sanitasi	13	1	
115	Kepala Subdirektorat Aparatur Pemerintah Daerah	13	0	
116	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah Daerah	13	1	
117	Kepala Subdirektorat Keuangan Daerah	13	1	
118	Kepala Subdirektorat Pangan	13	1	
119	Kepala Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura	13	1	
120	Kepala Subdirektorat Peternakan	13	1	
121	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pertanian	13	1	
122	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	13	0	
123	Kepala Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan	13	1	
124	Kepala Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air	13	1	
125	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir	13	1	
126	Kepala Subdirektorat Perikanan	13	1	
127	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman	13	1	
128	Kepala Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi	13	1	
129	Kepala Subdirektorat Mineral, Pertambangan, dan Panas Bumi	13	1	
130	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi	13	1	
131	Kepala Subdirektorat Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	13	0	
132	Kepala Subdirektorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	13	1	
133	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	13	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
134	Kepala Subdirektorat Analisis Kependudukan	13	0	
135	Kepala Subdirektorat Perlindungan Sosial	13	1	
136	Kepala Subdirektorat Mobilitas Penduduk	13	1	
137	Kepala Subdirektorat Kesempatan Kerja	13	1	
138	Kepala Subdirektorat Kualitas Tenaga Kerja	13	0	
139	Kepala Subdirektorat Hubungan Ketenagakerjaan	13	1	
140	Kepala Subdirektorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan	13	1	
141	Kepala Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan	13	1	
142	Kepala Subdirektorat Kebijakan Pengurangan Kemiskinan	13	0	
143	Kepala Subdirektorat Bantuan Sosial	13	1	
144	Kepala Subdirektorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin	13	0	
145	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha	13	1	
146	Kepala Subdirektorat Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	13	0	
147	Kepala Subdirektorat Pengembangan Koperasi	13	0	
148	Kepala Subdirektorat Kesehatan Masyarakat	13	0	
149	Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	13	1	
150	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan	13	0	
151	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat	13	1	
152	Kepala Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	13	1	
153	Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah	13	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
154	Kepala Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan	13	0	
155	Kepala Subdirektorat Agama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	13	0	
156	Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi	13	0	
157	Kepala Subdirektorat Riset dan Pengembangan Iptek	13	0	
158	Kepala Subdirektorat Difusi dan Inovasi Teknologi	13	1	
159	Kepala Subdirektorat Kebudayaan	13	1	
160	Kepala Subdirektorat Keluarga Berencana	13	1	
161	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	13	1	
162	Kepala Subdirektorat Perlindungan Anak	13	1	
163	Kepala Subdirektorat Pemuda dan Olahraga	13	0	
164	Kepala Subdirektorat Air Baku, Irigasi, dan Rawa	13	1	
165	Kepala Subdirektorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau	13	1	
166	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	13	0	
167	Kepala Subdirektorat Darat dan Jalan	13	1	
168	Kepala Subdirektorat Laut	13	1	
169	Kepala Subdirektorat Udara	13	1	
170	Kepala Subdirektorat Ketenagalistrikan	13	1	
171	Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika	13	0	
172	Kepala Subdirektorat Energi Non Ketenagalistrikan	13	1	
173	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta	13	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
174	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi	13	1	
175	Kepala Subdirektorat Rancang Bangun I	13	1	
176	Kepala Subdirektorat Rancang Bangun II	13	0	
177	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi	13	1	
178	Kepala Subdirektorat Wawasan Kebangsaan	13	1	
179	Kepala Subdirektorat Komunikasi	13	1	
180	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	13	1	
181	Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan Publik	13	0	
182	Kepala Subdirektorat Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	13	1	
183	Kepala Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi	13	1	
184	Kepala Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia	13	1	
185	Kepala Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM	13	0	
186	Kepala Subdirektorat Politik Luar Negeri	13	1	
187	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Global	13	1	
188	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Regional	13	1	
189	Kepala Subdirektorat Ketahanan Negara	13	1	
190	Kepala Subdirektorat Pertahanan Negara	13	0	
191	Kepala Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban	13	0	
192	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri	13	1	
193	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri	13	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
194	Kepala Subdirektorat Strategi Pendanaan Pembangunan	13	1	
195	Kepala Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas	13	0	
196	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim, dan Sumber Daya	13	1	
197	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Polhukhankam, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13	1	
198	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah	13	1	
199	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Asia	13	1	
200	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Eropa	13	0	
201	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah	13	1	
202	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral I	13	1	
203	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral II	13	1	
204	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral III	13	1	
205	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral IV	13	0	
206	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat	13	0	
207	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah	13	0	
208	Kepala Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan	13	1	
209	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan	13	1	
210	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	13	1	
211	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	13	1	
212	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	13	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
213	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral I	13	1	
214	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral II	13	0	
215	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral III	13	1	
216	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral IV	13	1	
217	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah I	13	0	
218	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah II	13	1	
219	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III	13	1	
220	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV	13	0	
221	Kepala Bagian Program dan Tata Usaha	13	1	
222	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	13	1	
223	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana	13	1	
224	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar	13	1	
225	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar	13	1	
226	Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	13	1	
227	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	13	1	
228	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik	13	1	
229	Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	13	1	
230	Kepala Bidang Pengelolaan Kebijakan	13	1	
231	Kepala Bidang Analisis Kebijakan	13	1	
232	Kepala Bidang Analisis Kinerja	13	0	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
233	Kepala Subbagian Komunikasi dan Publikasi	11	1	
234	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Publik	11	1	
235	Kepala Subbagian Persidangan	11	1	
236	Kepala Subbagian Protokol	11	1	
237	Kepala Subbagian Penyajian Bahan	11	1	
238	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan	11	1	
239	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	11	1	
240	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Ekonomi	11	1	
241	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengembangan Regional	11	1	
242	Kepala Subbagian TU Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	11	1	
243	Kepala Subbagian TU Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	11	1	
244	Kepala Subbagian TU Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	11	1	
245	Kepala Subbagian TU Deputy Bidang Sarana dan Prasarana	11	1	
246	Kepala Subbagian TU Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	11	1	
247	Kepala Subbagian TU Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan	11	1	
248	Kepala Subbagian TU Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	11	1	
249	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia	11	0	
250	Kepala Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia	11	1	
251	Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	11	0	
252	Kepala Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	11	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
253	Kepala Subbagian Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai	11	1	
254	Kepala Subbagian Penghargaan dan Penegakan Disiplin Pegawai	11	1	
255	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan	11	0	
256	Kepala Subbagian Penyusunan Keputusan	11	0	
257	Kepala Subbagian Pembelaan dan Pendampingan Hukum	11	1	
258	Kepala Subbagian Pelayanan dan Pendapat Hukum	11	0	
259	Kepala Subbagian Pengembangan Hukum	11	0	
260	Kepala Subbagian Data dan Informasi Hukum	11	1	
261	Kepala Subbagian Program	11	0	
262	Kepala Subbagian Anggaran	11	1	
263	Kepala Subbagian Perencanaan Kerjasama	11	0	
264	Kepala Subbagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan	11	1	
265	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran	11	0	
266	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	11	1	
267	Kepala Subbagian Organisasi	11	1	
268	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan	11	0	
269	Kepala Subbagian Tata Kelola Barang Milik Negara	11	0	
270	Kepala Subbagian Tata Kelola Persuratan	11	1	
271	Kepala Subbagian Perencanaan Pengadaan	11	1	
272	Kepala Subbagian Layanan Internal	11	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
273	Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan	11	1	
274	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	11	1	
275	Kepala Subbagian Pengujian Perintah pembayaran	11	1	
276	Kepala Subbagian Pelaporan Pembayaran	11	1	
277	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat Utama)	11	1	
278	Kepala Subbagian Program	11	1	
279	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana)	11	1	
280	Kepala Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan	11	0	
281	Kepala Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	11	1	
282	Kepala Subbidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana	11	0	
283	Kepala Subbidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana	11	0	
284	Kepala Subbidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar	11	1	
285	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar	11	1	
286	Kepala Subbidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar	11	1	
287	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar	11	0	
288	Kepala Subbagian Bagian Tata Usaha (Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan)	11	1	
289	Kepala Subbidang Pengembangan Prasarana TIK	11	1	
290	Kepala Subbidang Pemeliharaan Prasarana TIK	11	0	
291	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi	11	0	
292	Kepala Subbidang Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi	11	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
293	Kepala Subbidang Pengumpulan Data dan Informasi Elektronik	11	0	
294	Kepala Subbidang Penyajian Data dan Informasi Elektronik	11	1	
295	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Analis Kebijakan dan Kinerja)	11	1	
296	Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Analisis Kebijakan	11	0	
297	Kepala Subbidang Kerjasama dan Harmonisasi Analisis Kebijakan	11	0	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG KELAS JABATAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN,
DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Perencana Utama	Deputi/ Direktorat	14	13	
2	Perencana Madya	Deputi/ Direktorat/ Biro/ Pusat	12	43	
3	Perencana Muda	Deputi/ Direktorat/ Biro/ Pusat	10	74	
4	Perencana Pertama	Deputi/ Direktorat/ Biro/ Pusat/Inspektorat	9	72	
5	Auditor Utama	Inspektorat	14	0	
6	Auditor Madya	Inspektorat	12	0	
7	Auditor Muda	Inspektorat	10	4	
8	Auditor Pertama	Inspektorat	9	4	
9	Auditor Penyelia	Inspektorat	9	0	
10	Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	1	
11	Auditor Pelaksana	Inspektorat	6	0	
12	Widyaiswara Utama	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	12	5	
13	Widyaiswara Madya	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	10	2	
14	Widyaiswara Muda	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	8	1	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15	Widyaiswara Pertama	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	6	0	
16	Arsiparis Utama	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	13	0	
17	Arsiparis Madya	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	11	0	
18	Arsiparis Muda	Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	9	3	
19	Arsiparis Pertama	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat	8	10	
20	Arsiparis Penyelia	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	8	3	
21	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	Deputi/Direktorat/Biro/Inspektorat	6	11	
22	Arsiparis Terampil/Pelaksana	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Inspektorat	5	9	
23	Ajudan Menteri	Menteri	7	2	Disesuaikan dengan kepangkatan dan kelas jabatan pada instansi asalnya atau kesatuannya dalam hal yang bersangkutan memilih untuk mendapatkan Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
24	Staf Perencana Tk. I	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat	7	69	
25	Staf Perencana Tk. II	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/Pusat/Inspektorat	6	6	
26	Tata Usaha Tk.I	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/	5	75	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Pusat/Inspektorat			
27	Teknisi Tk. I	Biro Umum	5	5	
28	Tata Usaha Tk. II	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/ Pusat/Inspektorat	4	41	
29	Teknisi Tk. II	Biro Umum	4	1	
30	Satpam	Biro Umum	3	1	
31	Caraka	Biro Umum	3	7	
32	Pengemudi	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/ Pusat/Inspektorat	3	21	
33	Pramubakti	Sesmen/Deputi/Direktorat/Biro/ Pusat/Inspektorat	3	31	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
2	Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
3	Deputi Bidang Ekonomi	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
4	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
5	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
6	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
7	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
8	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
9	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
10	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
11	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.630	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	7	930	6	1325
12	Inspektur Utama	Kementerian PPN/ Bappenas	17	4.250	5	900	3	350	3	900	4	100	4	125	5	650	5	1225
13	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan	Kementerian PPN/ Bappenas	16	3.870	4	775	3	350	2	775	4	100	3	100	5	650	4	1120
14	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian PPN/ Bappenas	16	3.870	4	775	3	350	2	775	4	100	3	100	5	650	4	1120
15	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur	Kementerian PPN/ Bappenas	16	3.870	4	775	3	350	2	775	4	100	3	100	5	650	4	1120
16	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Kementerian PPN/ Bappenas	16	3.870	4	775	3	350	2	775	4	100	3	100	5	650	4	1120
17	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan	Kementerian PPN/ Bappenas	16	3.870	4	775	3	350	2	775	4	100	3	100	5	650	4	1120
18	Staf Khusus Menteri	Kementerian PPN/ Bappenas	16	3.620	3	550	3	350	2	775	3	75	3	100	5	650	4	1120
19	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
20	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.375	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120
21	Kepala Biro Hukum	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.375	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120
22	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120
23	Kepala Biro Umum	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.375	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120
24	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120
25	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120
26	Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120
27	Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120
28	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
29	Direktur Tata Ruang dan Pertanahan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
30	Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
31	Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
32	Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
33	Direktur Otonomi Daerah	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
34	Direktur Pangan dan Pertanian	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
35	Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
36	Direktur Kelautan dan Perikanan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
37	Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
38	Direktur Lingkungan Hidup	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
39	Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
40	Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
41	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
42	Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
43	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
44	Direktur Pendidikan dan Agama	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
45	Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
46	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
47	Direktur Pengairan dan Irigasi	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
48	Direktur Transportasi	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
49	Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
50	Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
51	Direktur Politik dan Komunikasi	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
52	Direktur Aparatur Negara	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
53	Direktur Hukum dan Regulasi	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
54	Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
55	Direktur Pertahanan dan Keamanan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
56	Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
57	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
58	Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
59	Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
60	Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
61	Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
62	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
63	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
64	Inspektur Bidang Administrasi Umum	Kementerian PPN/Bappenas	15	3.375	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
65	Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.375	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
66	Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.375	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
67	Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.375	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
68	Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja	Kementerian PPN/ Bappenas	15	3.600	4	775	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	4	1120		
69	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
70	Kepala Bagian Persidangan dan Protokol	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
71	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
72	Kepala Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
73	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
74	Kepala Bagian Kinerja Pegawai	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
75	Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
76	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
77	Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
78	Kepala Bagian Program dan Anggaran	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
79	Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
80	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
81	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
82	Kepala Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
83	Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
84	Kepala Bagian Keuangan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
85	Kepala Bagian Verifikasi Anggaran	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
86	Kepala Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
87	Kepala Subdirektorat Neraca Pembayaran	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
88	Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
89	Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
90	Kepala Subdirektorat Belanja Pemerintah Pusat	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
91	Kepala Subdirektorat Perimbangan Keuangan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
92	Kepala Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
93	Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
94	Kepala Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
95	Kepala Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
96	Kepala Subdirektorat Perdagangan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
97	Kepala Subdirektorat Investasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
98	Kepala Subdirektorat Kerjasama Ekonomi Internasional	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
99	Kepala Subdirektorat Industri	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
100	Kepala Subdirektorat Pariwisata	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
101	Kepala Subdirektorat Ekonomi Kreatif	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
102	Kepala Subdirektorat Tata Ruang	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
103	Kepala Subdirektorat Pertanahan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
104	Kepala Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
105	Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
106	Kepala Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
107	Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
108	Kepala Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
109	Kepala Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
110	Kepala Subdirektorat Perdesaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
111	Kepala Subdirektorat Perkotaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
112	Kepala Subdirektorat Perumahan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
113	Kepala Subdirektorat Air Minum	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
114	Kepala Subdirektorat Sanitasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
115	Kepala Subdirektorat Aparatur Pemerintah Daerah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
116	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
117	Kepala Subdirektorat Keuangan Daerah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
118	Kepala Subdirektorat Pangan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
119	Kepala Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
120	Kepala Subdirektorat Peternakan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
121	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Pertanian	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
122	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
123	Kepala Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
124	Kepala Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
125	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
126	Kepala Subdirektorat Perikanan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
127	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan, dan Kemaritiman	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
128	Kepala Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
129	Kepala Subdirektorat Mineral, Pertambangan, dan Panas Bumi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
130	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
131	Kepala Subdirektorat Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
132	Kepala Subdirektorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
133	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
134	Kepala Subdirektorat Analisis Kependudukan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
135	Kepala Subdirektorat Perlindungan Sosial	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
136	Kepala Subdirektorat Mobilitas Penduduk	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
137	Kepala Subdirektorat Kesempatan Kerja	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
138	Kepala Subdirektorat Kualitas Tenaga Kerja	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
139	Kepala Subdirektorat Hubungan Ketenagakerjaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
140	Kepala Subdirektorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
141	Kepala Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
142	Kepala Subdirektorat Kebijakan Pengurangan Kemiskinan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
143	Kepala Subdirektorat Bantuan Sosial	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
144	Kepala Subdirektorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
145	Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
146	Kepala Subdirektorat Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
147	Kepala Subdirektorat Pengembangan Koperasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
148	Kepala Subdirektorat Kesehatan Masyarakat	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
149	Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
150	Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
151	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
152	Kepala Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
153	Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
154	Kepala Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
155	Kepala Subdirektorat Agama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
156	Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
157	Kepala Subdirektorat Riset dan Pengembangan Iptek	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
158	Kepala Subdirektorat Difusi dan Inovasi Teknologi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
159	Kepala Subdirektorat Kebudayaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
160	Kepala Subdirektorat Keluarga Berencana	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
161	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
162	Kepala Subdirektorat Perlindungan Anak	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
163	Kepala Subdirektorat Pemuda dan Olahraga	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
164	Kepala Subdirektorat Air Baku, Irigasi, dan Rawa	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
165	Kepala Subdirektorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
166	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
167	Kepala Subdirektorat Darat dan Jalan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
168	Kepala Subdirektorat Laut	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
169	Kepala Subdirektorat Udara	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
170	Kepala Subdirektorat Ketenagalistrikan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
171	Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
172	Kepala Subdirektorat Energi Non Ketenagalistrikan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
173	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
174	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
175	Kepala Subdirektorat Rancang Bangun I	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
176	Kepala Subdirektorat Rancang Bangun II	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
177	Kepala Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
178	Kepala Subdirektorat Wawasan Kebangsaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
179	Kepala Subdirektorat Komunikasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
180	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
181	Kepala Subdirektorat Kualitas Pelayanan Publik	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
182	Kepala Subdirektorat Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
183	Kepala Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
184	Kepala Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
185	Kepala Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
186	Kepala Subdirektorat Politik Luar Negeri	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
187	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Global	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
188	Kepala Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Regional	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
189	Kepala Subdirektorat Ketahanan Negara	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
190	Kepala Subdirektorat Pertahanan Negara	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
191	Kepala Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
192	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
193	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
194	Kepala Subdirektorat Strategi Pendanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
195	Kepala Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
196	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim dan Sumber Daya	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		
197	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Polhukhankam, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
198	Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
199	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Asia	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
200	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Eropa	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
201	Kepala Subdirektorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
202	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral I	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
203	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral II	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
204	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral III	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
205	Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral IV	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
206	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
207	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
208	Kepala Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
209	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
210	Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
211	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
212	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
213	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral I	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
214	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral II	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
215	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral III	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
216	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral IV	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
217	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah I	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
218	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah II	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
219	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
220	Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
221	Kepala Bagian Program dan Tata Usaha	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
222	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
223	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
224	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
225	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
226	Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
227	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
228	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
229	Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
230	Kepala Bidang Pengelolaan Kebijakan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
231	Kepala Bidang Analisis Kebijakan	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
232	Kepala Bidang Analisis Kinerja	Kementerian PPN/ Bappenas	13	2.705	3	550	1	100	1	450	2	50	2	75	4	505	3	975
233	Kepala Subbagian Komunikasi dan Publikasi	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
234	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Publik	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
235	Kepala Subbagian Persidangan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
236	Kepala Subbagian Protokol	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
237	Kepala Subbagian Penyajian Bahan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
238	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
239	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
240	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ekonomi	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
241	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Regional	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
242	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
243	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
244	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
245	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
246	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
247	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
248	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
249	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
250	Kepala Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
251	Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
252	Kepala Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
253	Kepala Subbagian Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
254	Kepala Subbagian Penghargaan dan Penegakan Disiplin Pegawai	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
255	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
256	Kepala Subbagian Penyusunan Keputusan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
257	Kepala Subbagian Pembelaan dan Pendampingan Hukum	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
258	Kepala Subbagian Pelayanan dan Pendapat Hukum	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
259	Kepala Subbagian Pengembangan Hukum	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
260	Kepala Subbagian Data dan Informasi Hukum	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
261	Kepala Subbagian Program	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
262	Kepala Subbagian Anggaran	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1-3)		(1-3)		(1-4)		(1-4)		(1-8)		(1-6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
263	Kepala Subbagian Perencanaan Kerjasama	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
264	Kepala Subbagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
265	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
266	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
267	Kepala Subbagian Organisasi	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
268	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
269	Kepala Subbagian Tata Kelola Barang Milik Negara	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
270	Kepala Subbagian Tata Kelola Persuratan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
271	Kepala Subbagian Perencanaan Pengadaan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
272	Kepala Subbagian Layanan Internal	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
273	Kepala Subbagian Kas dan Perbendaharaan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
274	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
275	Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
276	Kepala Subbagian Pelaporan Pembayaran	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
277	Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat Utama)	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
278	Kepala Subbagian Program	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
279	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana)	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
280	Kepala Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain	
											Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
281	Kepala Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
282	Kepala Subbidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
283	Kepala Subbidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
284	Kepala Subbidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
285	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
286	Kepala Subbidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
287	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
288	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan)	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
289	Kepala Subbidang Pengembangan Prasarana TIK	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
290	Kepala Subbidang Pemeliharaan Prasarana TIK	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
291	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
292	Kepala Subbidang Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
293	Kepala Subbidang Pengumpulan Data dan Informasi Elektronik	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup Dampak		Faktor 2 Pengaturan Organisasi		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Mgr		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan		Faktor 6 Kondisi Lain			
													Sifat Hub.		Tujuan Hub.					
					(1-5)		(1 - 3)		(1 - 3)		(1 - 4)		(1 - 4)		(1 - 8)		(1 - 6)			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12			
294	Kepala Subbidang Penyajian Data dan Informasi Elektronik	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
295	Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja)	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
296	Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Analisis Kebijakan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		
297	Kepala Subbidang Kerjasama dan Harmonisasi Analisis Kebijakan	Kementerian PPN/ Bappenas	11	1.870	2	350	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
 LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG KELAS JABATAN
 PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	<u>FAKTOR 1</u> <u>Pengetahuan</u> <u>(Level 1~9)</u>		<u>FAKTOR 2</u> <u>Pengawasan</u> <u>(Level 1~5)</u>		<u>FAKTOR 3</u> <u>Pedoman</u> <u>(Level 1~5)</u>		<u>FAKTOR 4</u> <u>Kompleksitas</u> <u>(Level 1~6)</u>		<u>FAKTOR 5</u> <u>R.Lingkup</u> <u>& Pengaruh</u> <u>(Level 1~6)</u>		<u>FAKTOR 6</u> <u>Hub. Pribadi</u> <u>(Level 1~4)</u>		<u>FAKTOR 7</u> <u>Tujuan</u> <u>Hubungan</u> <u>(Level 1~4)</u>		<u>FAKTOR 8</u> <u>Tuntutan</u> <u>Fisik (Level</u> <u>1~3)</u>		<u>FAKTOR 9</u> <u>Lingk. Kerja</u> <u>(Level 1~3)</u>	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	Jabatan Fungsional Tertentu																				
1	Perencana Utama	14	3.020	7	1.250	4	450	4	450	5	325	4	255	3	60	4	220	1	5	1	5
2	Perencana Madya	12	2.170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 <u>Pengetahuan</u> (Level 1~9)		FAKTOR 2 <u>Pengawasan</u> (Level 1~5)		FAKTOR 3 <u>Pedoman</u> (Level 1~5)		FAKTOR 4 <u>Kompleksitas</u> (Level 1~6)		FAKTOR 5 <u>R.Lingkup & Pengaruh</u> (Level 1~6)		FAKTOR 6 <u>Hub. Pribadi</u> (Level 1~4)		FAKTOR 7 <u>Tujuan Hubungan</u> (Level 1~4)		FAKTOR 8 <u>Tuntutan Fisik (Level 1~3)</u>		FAKTOR 9 <u>Lingk. Kerja</u> (Level 1~3)		
				5	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
3	Perencana Muda	10	1.810	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5	
4	Perencana Pertama	9	1.510	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5	
5	Auditor Utama	14	3.020	7	1.250	4	450	4	450	5	325	4	255	3	60	4	220	1	5	1	5	
6	Auditor Madya	12	2.470	7	1.250	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5	
7	Auditor Muda	10	1.810	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5	
8	Auditor Pertama	9	1.510	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5	
9	Auditor Penyelia	9	1.510	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5	
10	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	990	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5	
11	Auditor Pelaksana	6	790	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5	
12	Widyaiswara Utama	12	2.345	6	950	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5	
13	Widyaiswara Madya	10	1.810	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5	
14	Widyaiswara Muda	8	1.340	5	750	3	275	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5	
15	Widyaiswara Pertama	6	740	3	350	2	125	2	125	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5	
16	Arsiparis Utama	13	2.545	7	1.250	4	450	2	125	4	225	4	255	4	110	3	120	1	5	1	5	
17	Arsiparis Madya	11	2.015	6	950	4	450	2	125	3	150	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	<u>FAKTOR 1</u> <u>Pengetahuan</u> <u>(Level 1~9)</u>		<u>FAKTOR 2</u> <u>Pengawasan</u> <u>(Level 1~5)</u>		<u>FAKTOR 3</u> <u>Pedoman</u> <u>(Level 1~5)</u>		<u>FAKTOR 4</u> <u>Kompleksitas</u> <u>(Level 1~6)</u>		<u>FAKTOR 5</u> <u>R.Lingkup & Pengaruh</u> <u>(Level 1~6)</u>		<u>FAKTOR 6</u> <u>Hub. Pribadi</u> <u>(Level 1~4)</u>		<u>FAKTOR 7</u> <u>Tujuan Hubungan</u> <u>(Level 1~4)</u>		<u>FAKTOR 8</u> <u>Tuntutan Fisik (Level 1~3)</u>		<u>FAKTOR 9</u> <u>Lingk. Kerja</u> <u>(Level 1~3)</u>	
				5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	3	120	1	5	1	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
18	Arsiparis Muda	9	1.565	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	3	120	1	5	1	5
19	Arsiparis Pertama	8	1.310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
20	Arsiparis Penyelia	8	1.110	4	550	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
21	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	6	805	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
22	Arsiparis Terampil/Pelaksana	5	640	2	200	2	125	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
	Jabatan Fungsional Umum																				
1	Staf Perencana Tk. I	7	940	4	550	2	125	2	125	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Staf Perencana Tk.II	6	840	4	550	1	25	2	125	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
3	Tata Usaha Tk.I	5	540	3	350	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Teknisi Tk. I	5	540	3	350	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Tata Usaha Tk. II	4	390	2	200	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Teknisi Tk. II	4	390	2	200	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Satpam	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Caraka	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 <u>Pengetahuan</u> (Level 1~9)		FAKTOR 2 <u>Pengawasan</u> (Level 1~5)		FAKTOR 3 <u>Pedoman</u> (Level 1~5)		FAKTOR 4 <u>Kompleksitas</u> (Level 1~6)		FAKTOR 5 <u>R.Lingkup & Pengaruh</u> (Level 1~6)		FAKTOR 6 <u>Hub. Pribadi</u> (Level 1~4)		FAKTOR 7 <u>Tujuan Hubungan</u> (Level 1~4)		FAKTOR 8 <u>Tuntutan Fisik</u> (Level 1~3)		FAKTOR 9 <u>Lingk. Kerja</u> (Level 1~3)	
				5	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
9	Pengemudi	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Pramubakti	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati